

INTISARI

PROSES PELAPORAN PERUBAHAN DATA SUSUNAN PENGURUS PADA LEMBAGA PENYIARAN SWASTA (STUDI KASUS PT. ABC)

Oleh :

Luvie Adhira¹ dan Sulistiowati²

Penelitian ini membahas mengenai proses perubahan data perseroan pada Lembaga Penyiaran Swasta dengan mengambil studi kasus pada salah satu perusahaan televisi swasta di Indonesia (PT. ABC).

Terkait perubahan data perseroan Lembaga Penyiaran Swasta sebagai perseroan terbatas tunduk kepada UU PT, selain itu berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kominfo, yang mengatur bahwa perubahan susunan pengurus dan anggaran dasar pada Lembaga Penyiaran Swasta, terlebih dahulu wajib dilaporkan kepada Menteri Kominfo untuk dilakukan evaluasi sebelum mendapat pengesahan dari RUPS. Ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU PT. Pada kenyataannya tidak setiap perubahan data pengurus dan anggaran dasar Lembaga Penyiaran Swasta mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Kominfo tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses perubahan data perseroan baik yang diatur dalam UU PT dan ketentuan yang diatur oleh Kominfo, serta akibat hukum dari proses pelaporan perubahan data yang ditempuh oleh PT. ABC.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana bekerjanya hukum melalui peraturan perundang-undangan memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Hasil pengamatan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang kompeten. Data-data tersebut dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif untuk ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang ada.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur perubahan data perseroan yang dilakukan oleh PT. ABC tidak sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kominfo dan akibat hukumnya yaitu batal demi hukum. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kominfo bertentangan dengan UU PT, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait perubahan data perseroan. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kominfo terkait perubahan data perseroan harus direvisi mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PT.

Kata – kata Kunci : Perseroan Terbatas, Lembaga Penyiaran Swasta, Perubahan Data Perseroan.

¹ Mahasiswa Program S-2 Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Kampus Jakarta

² Dosen, Guru besar, Fakultas Hukum – Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT
THE REPORTING PROCESS CHANGES THE DATA OF
THE COMPOSITION OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE IN
PRIVATE BROADCASTING COMPANY (CASE STUDY PT. ABC)

By
Luvie Adhira³ dan Sulistiowati⁴

This research is about the process of changing the company's data in Private Broadcast Company, it takes the case from one of the private television companies in Indonesia (PT. ABC). In terms of changing the company's data, Private Broadcast Company as a company applies to the regulation regarding companies in Indonesia, furthermore it also provisions of law and regulations published by the Ministry of Communications Republic of Indonesia, that changes in the composition of the organizational structure in Private Broadcast Company must be reported to the minister of Communications first to be evaluated before the shareholders general meeting is ratified. The provision is contradicted from regulation of company in Indonesia. In reality not every changes in the composition of the organizational structure in Private Broadcast Company following the procedure that Ministry of Communications has set. The purpose of this research is to analyze process of changing company's data which is regulated by regulation of company in Indonesia and regulated from Ministry of Communication and Information, and effect from reporting change of company's data that pursued by PT. ABC.

This research is juridical empiric research which is research that explained how the law works through regulations that give impact for people. The observations result then analyzed with prime legal material, secondary legal material and tertiary legal material through library research and interview with competent party. The data analyzed with legal qualitative method to be conclude for answer the problem.

According to the research concluded that procedure of changing company's data which is conducted by PT. ABC is not consistent with regulations which is published by Ministry of Communications and the consequences that is Void ab initio. Law and regulations which is published by Ministry of Communications contradict with regulation of company, so it increases legal uncertainty regarding changing of company's data. Therefore law and regulations which is published by Ministry of Communications need to be revised follow the rule as set by company regulation.

Key words: Company, Private Broadcast Company, Changes the Data of Company

³ Student of Legal Master Degree Program, Gadjah Mada University, Jakarta Campus.

⁴ Lecturer, Professor, Faculty Of Law – Gadjah Mada University.